

SABTU KLIWON, 2 SEPTEMBER 2017
(11 BESAR 1950)

OPINI

TAHUN LXXII NO 323,
"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 12

Polwan dan Representasi Perempuan

SELAIN Hari Bhayangkara, ada hari istimewa lain yang diperingati lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yakni Hari Polisi Wanita (Polwan). Peringatan setiap tanggal 1 September ini merupakan bentuk penghargaan bagi kaum perempuan yang telah mendedikasikan diri sebagai pelayan masyarakat melalui institusi Polri. Seiring dengan upaya meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat, Polwan menjadi salah satu modal penting. Kehadiran perempuan dirasa memberi warna yang berbeda. Perempuan menjadi simbol kelembutan, kesucian, dan keanggunan.

Menilik sejarahnya, Polwan mulai ada sejak 1 September 1948. Kala itu kondisi negara yang baru lahir masih kacau balau terlebih Belanda berkali-kali melancarkan agresi. Para pemimpin Republik Indonesia menjadi tawanan Belanda sebagai interniran. Pada detik-detik terakhir penahanan, Presiden Sukarno sempat memberi mandat kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi. Berawal dari kota indah di Sumatera Barat inilah Polwan lahir.

Akibat dari perang, terjadi pengungsian besar-besaran yang didominasi perempuan dan anak-anak. Mereka terpaksa pergi meninggalkan rumah untuk menjauh dari titik-titik pertempuran. Untuk mencegah terjadinya penyusupan dan berbagai hal yang tidak diinginkan maka para pengungsi ini diperiksa terlebih dahulu oleh polisi. Akan tetapi para pengungsi yang mayoritas perempuan tidak mau diperiksa begitu saja oleh polisi yang notabene laki-laki. Untuk mengatasinya, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara (SPN) di Bukittinggi untuk membuka Pendidikan Inspektur Polisi bagi kaum perempuan.

Hasilnya terpilih enam orang taruna putri berdarah Minang. Mereka adalah Mariana Saanin Mufti, Nelly Pauna Situmorang, Rosmalina Pramono, Dahniar Sukotjo, Djasmair Husein, dan Rosnalia Taher.

Hendra Kurniawan

Mereka secara resmi mulai mengikuti pendidikan pada tanggal 1 September 1948. Sejak itu Polwan memiliki tugas utama dalam hal penanganan dan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan yang melibatkan kaum perempuan baik sebagai korban maupun pelaku. Tugas Polwan lambat laun terus berkembang ti-



KR-JOKO SANTOSO

dak hanya berkutat pada masalah kejahatan perempuan, anak-anak dan remaja, maupun persoalan administrasi.

Femininitas

Di beberapa kota, termasuk Yogyakarta, menjelang Hari Polwan biasa digelar aksi simpatik. Disini, Polwan terampil memberi penyuluhan tertib berlalu lintas kepada para pengendara yang berhenti ketika lampu merah. Suasana tentu berbeda jika dibandingkan dengan saat operasi pemeriksaan kelengkapan berkendara. Demikian pula di layar televisi, akhir-akhir ini kerap dijumpai Polwan tampil sebagai reporter

maupun pembaca berita lalu lintas. Kehadiran para Polwan memang memberi kesan tersendiri. Masyarakat diharapkan menjadi merasa lebih nyaman ketika berurusan dengan Polisi karena tidak lagi menonjolkan nuansa keras, kaku, dan garang.

Polisi yang identik dengan maskulinitas mencoba memberi ruang bagi femininitas melalui kehadiran para Polwan. Padahal selama ini persepsi mengenai perempuan Indonesia yang feminin diidentikkan sebagai kaum yang dikekang, dibatasi, dan tidak diharapkan menjadi terlalu mampu. Hadirnya Polwan sebenarnya merupakan antitesis dari anggapan tersebut. Akan tetapi kini femininitas sebagai kaidah penampilan, sifat, dan perilaku pencari perempuan justru digarap apik sebagai daya pikat yang tidak dimiliki oleh laki-laki (maskulinitas).

Kita perlu melongok kisah sejarah Prajurit Estri dari Kraton Mangkunegaran, sosok-sosok perempuan yang memadukan maskulinitas dibalik kefemininannya. Mereka piawai memainkan senjata dan mengikuti perkembangan politik di samping menari, menyanyi, dan memainkan alat musik. Demikian pula keberadaan Polwan diharapkan tak sekadar menjadi *benges* bagi wajah kepolisian. Polwan harus mampu merepresentasikan kehadiran perempuan yang turut ambil peranan bagi bangsa dan negara ini. □ - o

**)Hendra Kurniawan MPd,*

*Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opini@core.ac.uk dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terima kasih